

BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

4.1.1 Proses *Collaborative Governance* Dalam Upaya Pengendalian Pencemaran Udara Pada Kawasan Industri Wijayakusuma Kota Semarang

Berdasarkan temuan penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa proses *collaborative governance* yang dilakukan dalam pengendalian pencemaran udara pada Kawasan Industri Wijayakusuma Kota Semarang telah berjalan sesuai dengan lima dimensi proses *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash. Kelima dimensi tersebut mencakup dialog tatap muka (*face to face dialogue*), membangun kepercayaan (*trust building*), komitmen terhadap proses (*commitment to process*), pemahaman bersama (*shared understanding*), dan hasil sementara (*intermediate outcomes*).

Dialog tatap muka pada proses *collaborative governance* dalam pengendalian pencemaran udara di Kawasan Industri Wijayakusuma sudah berjalan dengan adanya ruang interaksi langsung untuk merumuskan langkah penanganan dan bertukar informasi di antara *stakeholders*. Namun hal tersebut belum terwadahi dalam forum rutin yang permanen dan sebagian masih bersifat situasional. Pada setiap pertemuan yang dilakukan juga terdapat diskusi untuk mencapai kesepakatan bersama di antara *stakeholders* yang mengarah pada peluang-peluang adanya kondisi saling menguntungkan jika melakukan kolaborasi. Pada proses penyusunan kesepakatan kolaborasi dalam pengendalian pencemaran udara di Kawasan Industri Wijayakusuma dilakukan dengan menghasilkan berita acara maupun notulen.

Dalam membangun kepercayaan, proses kolaborasi berjalan baik meskipun masih terdapat kendala. Kepercayaan antar *stakeholders* tidak terbentuk secara instan tetapi berkembang melalui proses verifikasi lapangan dan keterbukaan informasi. Masyarakat mulai merasa percaya karena melihat DLH, PT. KIW, dan perusahaan turun langsung ketika ada keluhan, sementara industri menunjukkan keterbukaan dengan menjelaskan kondisi teknis serta memberikan klarifikasi dalam forum koordinasi. Namun, kepercayaan ini belum stabil sepenuhnya karena sebagian industri masih selektif dalam membuka data teknis dan terkadang masyarakat belum memahami karakteristik pencemar, sehingga dapat menimbulkan perbedaan persepsi mengenai sumber atau tingkat pencemaran. Dimensi kepercayaan telah berkembang namun masih menghadapi ketimpangan keterbukaan informasi yang perlu ditingkatkan agar hubungan antar *stakeholders* semakin kuat.

Komitmen terhadap proses memperlihatkan perkembangan yang cukup baik karena seluruh *stakeholders* menunjukkan keseriusan dalam mengikuti proses kolaborasi. Komitmen tampak melalui kehadiran aktif dalam rapat, sidang dokumen lingkungan, dan verifikasi lapangan. Bahkan ketika salah satu aktor tidak dapat hadir, mereka mengirim perwakilan untuk memastikan proses tetap berjalan. Komitmen ini juga tercermin dalam kesediaan para pihak menyesuaikan posisi ketika menghadapi perbedaan kepentingan, seperti industri yang bersedia menindaklanjuti rekomendasi teknis DLH meskipun memerlukan penyesuaian operasional, serta masyarakat yang

menerima hasil verifikasi teknis ketika temuan lapangan berbeda dengan dugaan awal.

Pemahaman bersama pada proses kolaborasi pengendalian pencemaran udara pada Kawasan Industri Wijayakusuma berjalan dengan baik tetapi belum dapat dikatakan maksimal. Kondisi ini dipengaruhi oleh masih adanya perbedaan prioritas di antara masing-masing *stakeholders* dalam memandang isu pencemaran udara. Perbedaan tersebut muncul seiring dengan variasi peran, kepentingan, serta tanggung jawab yang diemban oleh setiap aktor dalam proses kolaborasi. Dalam situasi tersebut, para aktor masih terus berupaya untuk mengenali dan mengakui kepentingan masing-masing pihak. Industri mulai memahami bahwa keluhan masyarakat merupakan bentuk kepedulian terhadap lingkungan, sedangkan masyarakat mulai mengerti bahwa proses teknis pengelolaan emisi memiliki batasan dan prosedur tertentu. Melalui proses ini, para aktor menyadari bahwa mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga kualitas udara dan mencegah dampak negatif pencemaran.

Hasil sementara dalam proses *collaborative governance* pada pengendalian pencemaran udara di Kawasan Industri Wijayakusuma menunjukkan bahwa kolaborasi yang terbangun telah menghasilkan sejumlah kemajuan awal, namun capaian tersebut masih bersifat sebagian dan belum memberikan dampak signifikan terhadap kualitas udara secara keseluruhan. Hasil sementara ini tampak dari meningkatnya respons para aktor terhadap keluhan masyarakat, di mana setiap aduan ditindaklanjuti melalui verifikasi

lapangan bersama antara DLH, PT. KIW, dan perusahaan terkait. Selain itu, beberapa tenant industri mulai melakukan perbaikan teknis seperti penyesuaian operasional, peningkatan pengelolaan emisi, serta mengikuti rekomendasi hasil evaluasi lingkungan. Proses pelaporan dan komunikasi teknis juga menjadi lebih jelas karena adanya koordinasi yang lebih intens antara pengelola kawasan dan tenant industri. Di sisi lain, masyarakat merasakan adanya ruang partisipasi yang lebih besar melalui rembug lingkungan, sosialisasi, dan keterlibatan dalam proses mediasi. Meskipun hasil ini belum dapat dikatakan sebagai capaian akhir, perkembangan-perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi mulai menghasilkan manfaat awal (*small wins*) yang penting bagi keberlanjutan proses kolaboratif di tahap berikutnya.

4.1.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Dalam Upaya Pengendalian Pencemaran Udara Pada Kawasan Industri Wijayakusuma Kota Semarang

Berdasarkan keseluruhan dinamika proses kolaborasi yang telah dijelaskan pada lima dimensi *collaborative governance*, dapat disimpulkan bahwa terdapat sejumlah faktor pendukung yang memperkuat jalannya kolaborasi dalam pengendalian pencemaran udara di Kawasan Industri Wijayakusuma. Faktor pendukung pertama berasal dari kondisi awal (*starting conditions*) para pemangku kepentingan, khususnya terkait perbedaan kapasitas dan sumber daya antaraktor. Kondisi awal ini menciptakan hubungan saling ketergantungan, di mana tidak ada satu aktor pun yang

mampu menyelesaikan permasalahan pencemaran udara secara mandiri. DLH memiliki kewenangan regulatif dan fungsi pengawasan, PT. KIW berperan sebagai pengelola kawasan yang memahami kondisi teknis industri, pihak industri memiliki kapasitas operasional yang berpengaruh langsung terhadap aktivitas produksi, sementara masyarakat memiliki pengalaman langsung sebagai pihak terdampak. Ketergantungan ini mendorong setiap aktor untuk terlibat dalam dialog tatap muka, membangun kepercayaan, serta menjaga komitmen dalam proses kolaborasi. Selain kondisi awal, faktor pendukung lainnya adalah kepemimpinan fasilitatif yang dijalankan oleh DLH Kota Semarang. Kepemimpinan ini berperan penting dalam memfasilitasi interaksi antaraktor, menjaga agar proses komunikasi tetap berjalan konstruktif, serta mengoordinasikan tindak lanjut ketika muncul aduan masyarakat. Peran DLH dalam memimpin verifikasi lapangan, memediasi perbedaan kepentingan, dan mengarahkan diskusi teknis turut memperkuat proses dialog, meningkatkan kepercayaan, serta membantu terbentuknya pemahaman bersama antar pemangku kepentingan.

Di sisi lain, proses kolaborasi juga menghadapi faktor penghambat yang terutama berkaitan dengan desain kelembagaan (*institutional design*). Desain kelembagaan yang belum tertata secara optimal menyebabkan kolaborasi belum memiliki wadah formal yang bersifat permanen dan terstruktur. Ketiadaan forum kolaboratif lintas pemangku kepentingan membuat interaksi, koordinasi, dan penyelarasan kepentingan lebih banyak terjadi secara situasional, bergantung pada munculnya aduan atau kebutuhan

teknis tertentu. Selain itu, belum adanya aturan formal yang secara khusus mengatur mekanisme kolaborasi antaraktor mengakibatkan peran dan kewenangan masing-masing pihak belum terintegrasi secara utuh, sehingga proses pengendalian pencemaran udara cenderung berjalan sektoral. Kondisi ini berdampak pada tidak konsistennya alur koordinasi serta terbatasnya ruang untuk perencanaan kolaboratif jangka panjang. Akibatnya, meskipun proses kolaborasi telah menghasilkan sejumlah capaian awal melalui peningkatan komunikasi, respons aduan, dan koordinasi teknis, namun efektivitas kolaborasi secara keseluruhan belum maksimal karena belum didukung oleh desain kelembagaan yang mampu mengikat dan mengarahkan seluruh aktor dalam satu kerangka kerja bersama.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian mengenai pelaksanaan *collaborative governance* dalam pengendalian pencemaran udara di Kawasan Industri Wijayakusuma Kota Semarang, peneliti memberikan beberapa saran yang difokuskan pada penguatan dialog tatap muka (*face to face dialogue*) dan desain kelembagaan kolaborasi (*institutional design*), yaitu:

1. Pada dimensi dialog tatap muka (*face to face dialogue*), meskipun interaksi langsung antar pemangku kepentingan telah berjalan cukup baik melalui pengawasan lapangan, sidang dokumen lingkungan, serta mediasi aduan masyarakat, intensitas dan keberlanjutan dialog tersebut masih bersifat situasional dan belum dilakukan secara rutin. Untuk mendorong proses kolaborasi yang lebih efektif, peneliti merekomendasikan peningkatan intensitas

dialog tatap muka melalui pembentukan forum pertemuan formal yang dilaksanakan secara berkala. Forum ini sebaiknya melibatkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, PT. Kawasan Industri Wijayakusuma, tenant industri, serta perwakilan masyarakat, sehingga dapat menjadi ruang komunikasi yang berkelanjutan dalam menyampaikan aspirasi, mendiskusikan persoalan teknis, dan merumuskan langkah pengendalian pencemaran udara secara bersama-sama. Dengan adanya dialog yang lebih rutin dan terstruktur, kepercayaan antaraktor serta pemahaman bersama diharapkan dapat semakin diperkuat.

2. Sejalan dengan penguatan dialog tatap muka tersebut, aspek desain kelembagaan (*institutional design*) dalam pelaksanaan *collaborative governance* juga perlu diperkuat agar proses kolaborasi tidak hanya bergantung pada interaksi situasional. Berdasarkan temuan penelitian, belum terdapat landasan hukum atau struktur kelembagaan khusus yang mengatur mekanisme kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam pengendalian pencemaran udara di Kawasan Industri Wijayakusuma. Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan pembentukan dasar hukum atau kesepakatan formal sebagai acuan bersama, seperti *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Dinas Lingkungan Hidup, PT. KIW, dan tenant industri dengan melibatkan perwakilan masyarakat. Keberadaan kesepakatan formal ini diharapkan dapat memperjelas peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, memperkuat koordinasi, serta menjadi dasar pembentukan forum kolaboratif yang bersifat lebih mengikat dan berkelanjutan, sehingga proses pengendalian pencemaran udara dapat berjalan secara lebih terintegrasi dan optimal.

3. Untuk memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan *collaborative governance*, diperlukan penerapan mekanisme insentif dan sanksi yang lebih tegas dan terukur. Berdasarkan temuan penelitian, tingkat komitmen dan kepatuhan antar tenant industri masih beragam, sehingga diperlukan dorongan yang bersifat motivasional sekaligus pengendalian. Peneliti merekomendasikan pemberian insentif kepada perusahaan yang menunjukkan kepatuhan tinggi serta melakukan inovasi dalam penerapan teknologi pengendalian emisi, seperti penghargaan lingkungan, publikasi praktik baik, atau prioritas dalam pelayanan administrasi perizinan. Di sisi lain, perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan pengendalian pencemaran udara perlu dikenai sanksi secara konsisten dan berjenjang, tidak hanya berupa sanksi administratif, tetapi juga sanksi yang berdampak pada keberlanjutan izin operasional apabila pelanggaran dilakukan secara berulang. Penerapan mekanisme insentif dan sanksi ini diharapkan dapat mendorong peningkatan komitmen, menciptakan keadilan antar pelaku usaha, serta memperkuat keberlanjutan proses kolaborasi dalam pengendalian pencemaran udara di Kawasan Industri Wijayakusuma.